

NIK:

FORM NOMOR INDUK KOPERASI (NIK) *(diisi jika sudah mengetahui nomor induk koperasi)*

Form: Permohonan NIK/Sertifikat NIK Perubahan Data

A. IDENTITAS KOPERASI :

1. Nama Koperasi *(Lengkap tidak disingkat)* :
2. Nomor / Tanggal Badan Hukum : Tanggal : / / *(tgl/bln/thn)*
3. Pengesahan Badan Hukum Koperasi *(oleh)* : 1). Deputi Bidang Kelembagaan KUKM atas Nama Menteri, 3). Bupati/Walikota atas Nama Menteri
(Centang salah satu) 2). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi 4). Gubernur atas Nama Menteri.
4. Tempat Kedudukan Koperasi :
5. Notaris/Camat Pembuat Akta Koperasi :
6. NPWP Koperasi *(15 digit)* :
7. Alamat>Nama Jalan :
(Jika tidak ada nama jalan, minimal desa/kelurahan/RT/RW)
Kelurahan / Desa :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :
Provinsi / D.I :
Kode POS :
8. No. Selular (HP) :
9. No. Telp. Kantor : *(wajib diisi)*
10. No. Faximili :
11. E-mail :
12. Website :
13. Catatan :
14. Status Koperasi *(centang salah satu)* : 1). Aktif, 2). Tidak Aktif
15. Koperasi Skala Besar *(centang salah satu)* : 1). Ya, 2). Tidak

B. DATA LAINNYA *(wajib dipilih salah satu)*

1. Bentuk Koperasi *(centang salah satu)* : 1). Primer Nasional, 3). Primer Kab/Kota, 5). Sekunder Provinsi,
 2). Primer Provinsi, 4). Sekunder Nasional, 6). Sekunder Kab/Kota
2. Jenis Koperasi *(centang salah satu)* : 1). Produsen, 2). Pemasaran, 3). Konsumen, 4). Jasa, 5). Simpan Pinjam
3. Kelompok Koperasi : *(tuliskan angka yang sesuai dari kode referensi halaman 9)*
4. Sektor Usaha : **KBLI** : *(tuliskan angka yang sesuai dari kode referensi halaman 9)*
5. Koperasi Binaan *(pilih salah satu)* : 1). Nasional, 2). Provinsi, 3). Kabupaten / Kota

C. DATA Perubahan Anggaran Dasar (PAD) *(hanya diisi jika telah melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar / PAD)*

1. Pengesahan Badan Hukum Koperasi (oleh) : 1). Deputi Bidang Kelembagaan KUKM atas Nama Menteri, 3). Bupati/Walikota atas Nama Menteri
(centang salah satu) 2). Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 4). Gubernur atas Nama Menteri,
2. Tempat Kedudukan Koperasi :
3. Notaris/Camat Pembuat Akta Koperasi :
4. Nomor /Tanggal PAD *(Jika ada)* : Tanggal PAD : *(tgl/bln/thn)*
5. Notaris/Camat Pembuat Akta PAD :
6. Jangka Waktu Pendirian : *(tgl/bln/thn)*
7. Alasan PAD :

D. DATA PERIZINAN *(Diisi jika telah mempunyai izin Usaha Perdagangan)*

1. Surat Izin Usaha Perdagangan
- Nomor :
- Tanggal Terbit : *(tgl/bln/thn)*
- Dikeluarkan oleh :
- Nama penanggungjawab :

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)
No.7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga
Atas Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

2. Surat Izin Tempat Usaha

Nomor :

Tanggal Terbit : / / (tgl/bln/thn)

Dikeluarkan oleh :

Masa berlaku : / / (tgl/bln/thn)

Nama penanggungjawab :

3. Tanda Daftar Perusahaan

Nomor :

Tanggal Terbit : / / (tgl/bln/thn)

Dikeluarkan oleh :

Masa berlaku : / / (tgl/bln/thn)

Nama penanggungjawab :

4. Informasi Rekening Bank

Nomor Rekening Bank 1 :

Nama Pemilik Rekening :

Nama Bank / Cabang :

Nomor Rekening Bank 2 :

Nama Pemilik Rekening :

Nama Bank / Cabang :

E. DATA UNIT SIMPAN PINJAM (USP) *(Hanya diisi jika bukan Koperasi Simpan Pinjam namun memiliki Usaha Simpan Pinjam)*

Apakah koperasi memiliki Usaha Simpan Pinjam (USP) ? 1). Ya, 2). Tidak

Jika Ya, Isikan data berikut : 1). Konvensional 2). Syari'ah

(Isian untuk USP Konvensional dan Syari'ah)

Nomor Surat Izin Simpan Pinjam :

Tanggal Terbit : / / *(tgl/bln/thn)*

Dikeluarkan oleh :

Masa berlaku : / / *(tgl/bln/thn)*

Nama penanggungjawab :

(Khusus untuk USP Syari'ah)

Nomor Sertifikat Dewan Syari'ah Nasional :

Tanggal Terbit : / / *(tgl/bln/thn)*

Dikeluarkan oleh MUI :

Masa berlaku : / / *(tgl/bln/thn)*

Nama penanggungjawab :

Nomor Sertifikat Rekomendasi MUI :

Tanggal Terbit : / / *(tgl/bln/thn)*

Dikeluarkan oleh MUI :

Masa berlaku : / / *(tgl/bln/thn)*

Nama penanggungjawab :

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Periode Kepengurusan:

KETUA KOPERASI *(WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)*

NO	Periode Mulai <i>(tgl/bln/thn)</i>	Periode Berakhir <i>(tgl/bln/thn)</i>	Nama Ketua	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan (NPWP)	Nomor BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan	Telepon	Pendidikan
1								

SEKRETARIS *(WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)*

NO	Periode Mulai <i>(tgl/bln/thn)</i>	Periode Berakhir <i>(tgl/bln/thn)</i>	Nama Ketua	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan (NPWP)	Nomor BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan	Telepon	Pendidikan
1								

BENDAHARA *(WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)*

NO	Periode Mulai <i>(tgl/bln/thn)</i>	Periode Berakhir <i>(tgl/bln/thn)</i>	Nama Ketua	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan (NPWP)	Nomor BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan	Telepon	Pendidikan
1								

MANAGER *(WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)*

NO	Periode Mulai <i>(tgl/bln/thn)</i>	Periode Berakhir <i>(tgl/bln/thn)</i>	Nama Ketua	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan (NPWP)	Nomor BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan	Telepon	Pendidikan
1								

PENGAWAS (WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)

NO	Periode Mulai (tgl/bln/thn)	Periode Berakhir (tgl/bln/thn)	Nama Ketua	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan (NPWP)	Nomor BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan	Telepon	Pendidikan
1								

INDIKATOR KELEMBAGAAN (KOPERASI SEKUNDER) (WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)

Tahun Buku	Anggota Badan Hukum		Karyawan (orang)			Manajer (orang)			Tanggal Pelaksanaan RAT
	NIK	Nama Koperasi	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
2019									
2020									
2021									

INDIKATOR KELEMBAGAAN (WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)

Tahun Buku	Anggota (orang)			Karyawan (orang)			Manajer (orang)			Tanggal Pelaksanaan RAT
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
2019										
2020										
2021										

INDIKATOR USAHA *(WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)*

Tahun Buku	Modal Sendiri	Modal Luar	Asset	Volume Usaha	Selisih Hasil Usaha
2019	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2020	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2021	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Petugas Pendata,

.....,20...

Nama :

Pengurus Koperasi :

Jabatan :

Jabatan :

Telepon :

Telepon :

E-mail: nik@kemenkopukm.go.id dengan **Subjek E-mail:** [Provinsi] – [Kabupaten/Kota] – Info Jumlah usulan Cetak Sertifikat NIK

Form ini bisa di download di website: <http://nik.depkop.go.id>

KETERANGAN FORM

Kode Referensi

A. STATUS KOPERASI

1. Koperasi Di Aktifkan

1. Diaktifkan Kembali dari status - Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti
2. Diaktifkan Kembali dari status - Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan
3. Diaktifkan Kembali dari status - Kelangsungan hidup koperasi tidak dapat diharapkan
4. Diaktifkan Kembali dari status - Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun
5. Diaktifkan Kembali dari status - Tidak melaporkan RAT 3 tahun berturut-turut
6. Diaktifkan Kembali dari status – Jangka waktu berdirinya telah berakhir
7. Diaktifkan Kembali dari status - Bermasalah hukum (asset dan pinjaman dengan pihak ketiga)
8. Diaktifkan Kembali dari status - SK Pendirian badan hukum belum ada
9. Diaktifkan Kembali dari status - Permasalahan internal koperasi
10. Diaktifkan Kembali dari status - Koperasi tidak ditemukan dilapangan
11. Diaktifkan Kembali dari status - Data double
12. Diaktifkan Kembali dari status - Kesalahan input
13. Diaktifkan Kembali dari status - Lainnya

2. Koperasi Di Tidak Aktifkan

1. Tidak Aktif - Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti
2. Tidak Aktif - Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan
3. Tidak Aktif - Kelangsungan hidup koperasi tidak dapat diharapkan
4. Tidak Aktif - Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun
5. Tidak Aktif - Tidak melaporkan RAT 3 tahun berturut-turut
6. Tidak Aktif - Jangka waktu berdirinya telah berakhir
7. Tidak Aktif - Bermasalah hukum (asset dan pinjaman dengan pihak ketiga)
8. Tidak Aktif - SK Pendirian badan hukum belum ada
9. Tidak Aktif - Permasalahan internal koperasi
10. Tidak Aktif - Koperasi tidak ditemukan dilapangan
11. Tidak Aktif - Data double
12. Tidak Aktif - Kesalahan input

B. DATA LAINNYA

3. Kelompok Koperasi

- | | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. KUD | 12. Kop. Angkatan Darat | 23. Kop. Angkutan Penyeberangan | 34. Kop. Wredatama |
| 2. Kop. Pertanian | 13. Kop. Angkatan Laut | 24. Kop. Wisata | 35. Kop. Pepabri |
| 3. Kop. Perkebunan | 14. Kop. Angkatan Udara | 25. Kop. Telkom | 36. Kop. Mahasiswa |
| 4. Kop. Peternakan | 15. Kop. Kepolisian | 26. Kop. Perumahan | 37. Kop. Pemuda |
| 5. Kop. Nelayan | 16. Kop. Serba Usaha | 27. K.B.P.R | 38. Kop. Pertambangan |
| 6. Kop. Kehutanan | 17. Kop. Pasar | 28. Kop. Pegawai Negeri (KPRI) | 39. Kop. Pedagang Kaki Lima |
| 7. Kopti | 18. Kop. Simpan Pinjam | 29. Kop. Listrik Pedesaan | 40. Kop. Jamu Gendong |
| 8. Kopra | 19. Kop. Angkutan Darat | 30. Koperasi Asuransi Indonesia | 41. Kop. Lainnya |
| 9. Kopinkra | 20. Kop. Angkutan Laut | 31. Kop. Wanita | 42. Kop. Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS) |
| 10. Koppontren | 21. Kop. Angkutan Udara | 32. Kop. Profesi | 43. Kop. Sekunder |
| 11. Kopkar | 22. Kop. Angkutan Sungai | 33. Kop. Veteran | 44. Kop. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) |
| | | | 45. Kop. Digital |
| | | | 46. Kop. Multi Pihak |

4. Sektor Usaha dan KBLI

- | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 7. Perdagangan Besar dan Eceran – Rep Mobil dan Motor | 13. Jasa Perusahaan |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 8. Transportasi dan Pergudangan | 14. Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial |
| 3. Industri Pengolahan | 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 15. Jasa Pendidikan |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 10. Informasi dan Komunikasi | 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial |
| 5. Pengadaan Air, Peng. Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 17. Jasa Lainnya |
| 6. Konstruksi | 12. Real Estat | |